



BAPENDA
KABUPATEN SERANG

RENCANA KERJA 2025 PERUBAHAN



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 ini mengacu pada RKPD Perubahan sehingga terdapat penyesuaian terhadap anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, baik terkait program, kegiatan, atau sumber daya yang dialokasikan. Selain itu, penyusunan dokumen ini merupakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja dan pengukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah organisasi untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban visi dan misi pemerintahan daerah untuk menuju terciptanya landasan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa di dalam menyusun dokumen ini masih terdapat banyak kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian, besar harapan kami agar dokumen ini dapat bermanfaat khususnya bagi yang memerlukannya.

Serang, 31 Juli 2025

KEPALA BAPENDA
KABUPATEN SERANG



Drs. H. M. ISHAK AR, M.Si
NIP. 19710907 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iiiv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra	II-1
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan	II-18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	II-22
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	II-30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-375
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bapenda.....	III-1
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025	III-6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	III-1
BAB V PENUTUP	III-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 Indikator Sasaran dan Indikator Program Tahun 2025	I-3
Tabel 2.1.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	II-1
Tabel 2.1.2 Laporan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023	II-3
Tabel 2.1.3 Rekapitulasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Renstra ..	II-12
Tabel 2.2.1 Target Kinerja	II-19
Tabel 2.2.2 Realisasi Kinerja.....	II-20
Tabel 2.2.3 Realisasi Berdasarkan Rasio	II-21
Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 2025.....	II-31
Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan	II-397
Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	III-5
Tabel 3.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025	III-7
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025	IV-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.1 Struktur Organisasi.....	II-29
---------------------------------------	-------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Serang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Renja Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan rencana tahunan kelima dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026 yang memuat rencana pencapaian indikator-indikator kinerja Kabupaten Serang serta beberapa indikator lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi Banten serta muatan lokal lainnya.

Renja Bapenda Kabupaten Serang merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta pertimbangan berbagai kebijakan Nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang serta pertimbangan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa :

- (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas

Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - b. Program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Kemudian, dalam Pasal 84 disebutkan bahwa :

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memastikan kesesuaian Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Ranwal RKPD.

Kemudian, berdasarkan RKPD Perubahan sehingga terdapat penyesuaian terhadap anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, baik terkait program, kegiatan, atau sumber daya yang dialokasikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja Perubahan Bapenda Tahun 2025 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Renja Perubahan Bapenda Kabupaten Serang tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang tahun 2025 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya memuat kebijakan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025.

Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang dan Renstra Bapenda Kabupaten Serang, memuat kerangka pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Renja Perubahan Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025 yang memuat prioritas peningkatan kinerja

pemerintahan daerah disusun dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam memantapkan manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Serang. Bagi masing-masing bidang dan perangkat kerja di lingkungan Bapenda Kabupaten Serang berkewajiban untuk mempedomani serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Bapenda sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Serang yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi.

Dokumen Renja Perubahan Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah tahun 2025 di Kabupaten Serang.

Indikator Sasaran dan Indikator Program pada Bapenda Kabupaten Serang tahun 2025 yang merupakan urusan dengan berdasarkan target pada RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 yaitu :

Tabel 1.1.1 Indikator Sasaran dan Indikator Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025
1	Tingkat Pertumbuhan PAD	3,39%	Tingkat ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah	100%
2	Nilai SAKIP	BB	Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	100%

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025 didasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang (RPJMD) Tahun 2021 - 2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
16. Peraturan Bupati Serang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang;

17. Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang;
18. Surat Edaran Bupati Nomor : 000.7.2/3/BAPPERIDA/2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Serang Tahun 2026
19. Surat Edaran Bupati Serang Nomor : 900.1.3/304/BPKAD/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
20. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Nomor 800/Kep.09-Bapenda/2023 tentang Rincian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah untuk memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Bapenda Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025. Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah :

- a. Sebagai acuan/arah bagi Bapenda Kabupaten Serang dalam menyusun program/kegiatan prioritas Tahun 2025;
- b. Merumuskan rencana program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Serang pada tahun 2025.
- c. Penyesuaian perubahan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, baik terkait program, kegiatan, atau sumber daya yang dialokasikan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan Renja Perubahan Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025, adalah :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Bapenda, proses penyusunan Renja Perubahan Bapenda, keterkaitan antara Renja Perubahan Bapenda dengan dokumen Rancangan Akhir RKPD, Renstra Bapenda serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan

Bapenda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bapenda;

1.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Bapenda.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Bapenda, serta susunan garis besar dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bapenda.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD Tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bapenda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bapenda tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bapenda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam dokumen perencanaan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bapenda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bapenda.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional/Global seperti NSPK, SPM dan SDG's (*Sustainable Development Goals*).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bapenda.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Akhir RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam Rancangan Akhir RKPD, atau program dan kegiatan namun besarnya berbeda

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bapenda, kewenangan Bapenda, kebijakan dan prioritas daerah Tahun 2025.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda

Perumusan tujuan dan sasaran Tahun 2025 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam RPJMD 2021-2026 dan Renstra Bapenda 2021-2026. Bagian ini menguraikan juga tentang indikator dan terget Tahun 2025.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama beserta tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bapenda

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapenda Kabupaten Serang sebagai berikut:

Tabel 2.1.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	TARGET (Rp) 2023	REALISASI (Rp) 2023	RASIO %
1	Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	97,71%	97,71%
2	Persentase Perencanaan dan Penganggaran, Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Pada Tahun Anggaran 2023, Bapenda Kabupaten Serang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah, yaitu meningkatnya pendapatan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kontribusi pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebesar 97,71%, dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut menunjukkan telah tercapainya sasaran, yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pencapaian Indikator Kinerja Kunci diatas merupakan hasil kontribusi dari pelaksanaan 2 (dua) program dan 43 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan 5 (lima) Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan
- 2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 1 (satu) Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan

Jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun 2023 memang tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab realisasi yang tidak melebihi/mencapai target. Namun demikian, meski dihadapkan dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu dan cenderung turun, Bapenda Kabupaten Serang mampu menunjukkan hasil yang sangat baik dan hampir mencapai target yang telah ditetapkan.

Bapenda Kabupaten Serang telah mengambil kebijakan-kebijakan guna mengatasi kendala dalam mencapai target pendapatan dan kinerja perangkat daerah. Bapenda Kabupaten Serang memberikan stimulus pajak daerah berupa Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Serang Nomor 973/Kep.214-Huk.Bapenda/2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah. Bapenda Kabupaten Serang juga telah melakukan kerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai strategi dalam mengejar penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Kinerja program yang ditetapkan dalam rencana strategis memuat kinerja program yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan perangkat daerah. Maka dari itu, ketidaktercapaian kinerja program rencana kerja dapat berdampak pada target capaian kinerja program rencana strategis. Penyesuaian target dalam rencana strategis mungkin perlu dilakukan jika capaian kinerja rencana kerja terus menunjukkan hasil yang tidak maksimal.

Realisasi pelaksanaan Belanja program dan kegiatan pada Bapenda Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 43.881.032.913,- dan realisasi realisasi Rp.41.578.066.230,- atau 94,75% dari total anggaran. Uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2 Laporan Realisasi Capaian Kinerja Bapenda Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
				K	Satuan	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	38.638.280.543	21,32	9.227.728.224	22,78	8.901.080.128	16,78	8.534.308.833	39,11	10.146.621.536	100,00	35.935.287.107	100,00	93,004
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan	100	%	164.693.869	0	14.674.200	0	13.830.000	0	25.656.000	100,00	107.152.000	100,00	161.312.200	100,00	97,947
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	89.438.700	0	14.674.200	0	0	0	0	3	71.790.100	3	86.464.300	100,00	96,674
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	25.932.240	0	0	0	0	0	25.656.000	1		1	25.656.000	100,00	98,935
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	49.322.929	0	0	0	13.830.000	0	0	1	35.361.900	1	49.191.900	100,00	99,734

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
				K	Satuan	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan	100	%	33.864.339.360	25,00	8.260.069.282	25,00	8.035.379.070	25,00	7.679.548.133	25,00	8.363.022.614	100,00	32.338.019.099	100,00	95,493
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Orang/Bulan	33.423.100.000	72	8.194.403.528	72	7.928.473.939	72	7.541.308.009	72	8.263.166.917	72	31.927.342.393	100,00	95,525
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	437.846.360	1	65.665.754	1	106.905.131	1	136.017.324	1	98.724.197	4	407.312.406	100,00	93,026
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	3.393.000	3	0	3	0	3	2.222.800	3	1.141.500	12	3.364.300	100,00	99,154
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran tepat waktu	100	%	2.330.815.240	28,57	393.368.162	32,14	401.092.750	14,29	326.162.700	25,00	1.078.774.000	100,00	2.199.397.612	100,00	94,362

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
				K	Satuan	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	36.155.200	1	24.503.600	2	10.412.500	0	0	0	0	3	34.916.100	100,00	96,573
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	484.006.440	1	0	2	0	0	0	0	0	3	357.540.000	100,00	73,871
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	226.718.400	1	81.786.100	1	83.090.250	0	0	1	58.936.000	3	223.812.350	100,00	98,718
		Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	110.435.200	1	58.839.400	0	0	0	3.619.100	2	47.362.000	3	109.820.500	100,00	99,443
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	18.000.000	3	1.500.000	3	6.000.000	3	4.500.000	3	6.000.000	12	18.000.000	100,00	100,000

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
				K	Satuan	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	1.455.500.000	1	226.739.062	1	301.590.000	1	318.043.600	1	608.936.000	4	1.455.308.662	100,00	99,987
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.417.135.080	25	278.533.680	25	304.222.308	25	343.335.900	25	350.682.582	100,00	1.276.774.470	100,00	90,095
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	7.000.000	1	7.000.000	1	0	1	0	1	0	4	7.000.000	100,00	100,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	851.264.008	1	134.083.142	1	181.397.151	1	218.430.743	1	220.819.668	4	754.730.704	100,00	88,660

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
				K	Satuan	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	558.871.072	1	137.450.538	1	122.825.157	1	124.905.157	1	129.862.914	4	515.043.766	100,00	92,158
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	%	861.296.994	28	281.082.900	32	146.556.000	20	159.606.100	21	246.990.340	100,00	834.235.340	100,00	96,858
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit	248.205.600	9	71.758.300	4	46.636.000	6	64.001.100	4	51.683.900	23	234.079.300	100,00	94,309
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	117	Unit	32.078.000	38	0	49	13.410.000	30	18.450.000	0		117	31.860.000	100,00	99,320
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	504.150.694	0	197.424.600	1	60.035.000	0	46.655.000	0	195.306.440	1	499.421.040	100,00	99,062
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	73	Unit	76.862.700	13	11.900.000	14	26.475.000	6	30.500.000	40		73	68.875.000	100,00	89,608

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
				K	Satuan	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah	100	%	5.242.752.370		555.823.121		1.267.842.069		1.156.194.995	34,85	1.788.467.324	97,71	4.768.327.509	97,71	90,951
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Pendapatan Daerah	100	%			9,09		27,27		36,36		27,27	100,00		100,00	
			Persentase Pelaksanaan Penyuluhan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah	100	%	5.242.752.370		16,67		16,67		50,00		16,67	100,00	4.768.327.509	100,00	90,951
			Persentase Pelaksanaan Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan	100	%			6,06		36,36		27,27		30,30	100,00		100,00	
			Persentase Pelaksanaan Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan	100	%			16,67		43,94		22,73		16,67	100,00		100,00	
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Dokumen	65.715.420	0	7.185.900	0	14.947.500	1	7.020.000	1	21.802.400	2	50.955.800	100,00	77,540

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
				K	Satuan	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5	Dokumen	441.052.595	0	187.254.800	2	42.665.900	2	47.883.000	1	154.411.700	5	432.215.400	100,00	97,996
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	Laporan	488.552.520	1	0	1	113.240.000	1	237.416.000	1	123.762.500	4	474.418.500	100,00	97,107
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4	Unit	954.702.032	0	75.739.228	0	560.813.342	4	19.108.842	0	189.183.284	4	844.844.696	100,00	88,493
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4	Laporan	610.409.124	1	78.774.596	1	135.499.446	1	123.219.927	1	200.297.466	4	537.791.435	100,00	88,103
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	Laporan	318.282.576	1	51.062.115	1	146.835.921	1	17.046.921	1	67.091.392	4	282.036.349	100,00	88,612

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
				K	Satuan	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	25	Objek Pajak	1.214.669.910	0	0	10	0	7	543.635.820	8	604.810.020	25	1.148.445.840	100,00	94,548
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4	Dokumen	661.603.463	1	54.721.912	1	177.993.855	1	84.626.880	1	272.606.252	4	589.948.899	100,00	89,170
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10.144	Layanan	18.445.200	0	14.352.000	6.423	0	4.252	4.065.600			10675	18.417.600	105,23	99,850
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	Dokumen	13.500.000	3	0	3	0	3	0	3	13.336.000	12	13.336.000	100,00	98,785
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4	Dokumen	121.782.450	1	37.384.500	1	5.250.000	1	0	1	19.125.000	4	61.759.500	100,00	50,713

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/SubKegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	
				K	Satuan	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4	Dokumen	4.860.000	1	0	1	0	1	0	1		4	0	100,00	0,000
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	46	Dokumen	310.435.080	6	49.348.070	24	64.272.105	10	64.272.105	6	117.563.210	46	295.455.490	100,00	95,175
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	Laporan	18.742.000	1	0	1	6.324.000	1	7.899.900	1	4.478.100	4	18.702.000	100,00	99,787
				10.613		43.881.032.913	163	9.783.551.345	6.625	10.168.922.197	4.411	9.690.503.828	161	11.935.088.860	11.144	41.578.066.230	105,00	94,75

Tabel 2.1.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama OPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan	%	100	200	100	100	100	100	100	100
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	18	3	3	100	9	9	100
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	4	1	1	100	2	2	100
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2					2	2	100
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	8	1	1	100	4	4	100
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan	%	100	200	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	73	146	72	72	100	73	73	100
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	8	4	4	100	4	4	100
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	24	12	12	100	12	12	100
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran tepat waktu	%	100	200	100	100	100	100	100	100
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	6	3	3	100	3	3	100
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	3	3	100	3	3	100
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	6	3	3	100	3	3	100
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	6	3	3	100	3	3	100
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	24	12	12	100	12	12	100
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	8	4	4	100	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	%	100	200				100	100	100
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	2	-				-	-	0
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1	-				-	-	0
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	8	4	4	100	4	4	100
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	200	100	100	100	100	100	100
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	33	46	23	23	100	23	23	100
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	80	88	117	117	100	44	44	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	1	1	100	1	1	100
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	43	88	73	73	100	44	44	100
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Pendapatan Daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran	%	100	200	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
		Objek Pajak Daerah									
		Persentase Pelaksanaan Penilaian PBB P2	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase Realisasi Penagihan Pajak Daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah	%	100	200	100	100	100	100	100	100
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	4	2	2	100	2	2	100
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	10	10	5	5	100	5	5	100
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	54	8	4	4	100	4	4	100
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	8	4	4	100	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	objek pajak	25	50	25	25	100	25	25	100
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	10.144	20.288	10,144	10,144	100	10,144	10,144	100
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12	24	12	12	100	12	12	100
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	8	4	4	100	4	4	100
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	8	4	4	100	4	4	100

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bapenda Kabupaten Serang

Analisis kinerja pelayanan Bapenda Kabupaten Serang berisikan capaian kinerja pelayanan Bapenda Kabupaten Serang berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2023 adalah :

- a. Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah sebesar 97,71% dari target sebesar 100%
- b. Persentase Perencanaan dan Penganggaran, Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Adapun pencapaian, dan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Bapenda Kabupaten Serang pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Target Kinerja Bapenda Kabupaten Serang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp	291.931.000.000	354.253.000.000	384.872.990.000	427.635.000.000	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	-	-	33.993.762.000	33.191.348.000	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Poin	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-
4	Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Perencanaan dan Penganggaran, Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.2.2 Realisasi Kinerja Bapenda Kabupaten Serang

No	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp.	337.253.848.564	379.045.284.058	381.734.146.730	378.839.996.148	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.	-	-	35.259.940.321	41.357.821.227	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Poin	78,25	81,54	114,52	89,89	-	-	-	-	-	-
4	Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	%	-	-	-	-	74,13	80,48				
5	Persentase Perencanaan dan Penganggaran, Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	100	121,92				

Tabel 2.2.3 Realisasi Berdasarkan Rasio Bapenda Kabupaten Serang

NO	INDIKATOR	SATUAN	RASIO RELISASI TERHADAP TARGET RENSTRA (%)							RASIO REALISASI TERHADAP TARGET RENJA (%)							KETERANGAN
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp.	118,71	130,20	126,29	120,73	-	-	-	115,53	107,00	99,18	90,84	-	-	-	BPPD/BAPEN DA Kab. Serang
2	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.	-	-	103,72	117,46	-	-	-	-	-	103,72	113,83	-	-	-	BAPENDA
3	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Point	97,81	101,93	143,15	112,36	-	-	-	97,81	101,93	143,15	112,36	-	-	-	BPPD/BAPEN DA Kab. Serang
4	Tingkat Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	%	-	-	-	-	74,13	80,48	-	-	-	-	-	74,13	80,48	80,48	BAPENDA Kab. Serang
5	Persentase Perencanaan dan Penganggaran, Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	100	121,92	-	-	-	-	-	100	121,92	121,92	BAPENDA Kab. Serang

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Serang

Bapenda Kabupaten Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagai Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, Bapenda telah berhasil menunjukkan kinerja pelayanan yang maksimal dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan target pendapatan dan realisasinya setiap tahun meski sedang dalam kondisi perekonomian yang syarat dengan ketidakpastian akibat pandemi *covid-19*.

Faktor-faktor kritis yang terkait dengan pelayanan Bapenda Kabupaten Serang mencakup semua hal yang dapat membuat pelayanan bekerja secara lebih optimal baik secara internal maupun eksternal. Peningkatan kapasitas staf pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan guna mendukung optimalisasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bapenda Kabupaten Serang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program kegiatan perencanaan dan pengembangan PAD khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan pajak daerah lainnya, pengelolaan PBB dan BPHTB, penagihan dan keberatan pajak daerah;
- b. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan perpajakan daerah, pajak daerah lainnya, PBB dan BPHTB, penagihan dan keberatan pajak daerah;
- c. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional perencanaan dan pengembangan perpajakan daerah, pajak daerah lainnya, PBB dan BPHTB, penagihan dan keberatan pajak daerah; dan
- d. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan perpajakan daerah, pajak daerah lainnya, PBB dan BPHTB, penagihan dan keberatan pajak daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bapenda Kabupaten Serang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum tersedianya basis data potensi pajak daerah secara akurat;
2. Belum tersedianya data spasial/peta digital bidang objek pajak secara lengkap;
3. Belum optimalnya penggalan sumber-sumber pajak daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi;
4. Masih kurangnya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajibannya selaku wajib pajak daerah;

5. Kurangnya kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata kelola perpajakan daerah;
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan pajak daerah;
7. Belum terbentuknya jabatan penilai, pemeriksa, jurusita dan PPNS pajak daerah;

Permasalahan di atas pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan capaian program. Dalam mencapai visi dan misi, Kepala Daerah memerlukan efisiensi dan efektifitas setiap Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hal ini akan terwujud jika setiap Perangkat Daerah berhasil mengatasi hambatan dan permasalahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentunya dengan bantuan dan dukungan yang memadai.

Metode *SWOT Analysis* adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi.

Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN (STRENGTH)

1. **Hukum dan Perundangan** : Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, Peraturan Bupati Serang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan daerah Kabupaten Serang sebagai dasar dalam pengelolaan pajak daerah, maka acuan hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dapat bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan pajak daerah, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/badan legislatif daerah sebagai dasar hukum.
2. **Potensi dan lokasi** : Letak geografis Wilayah Kabupaten Serang sebagai penyangga ibu Kota Provinsi yang strategis sudah

barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap perkembangan pembangunan perumahan, sektor industri dan sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan pajak daerah, baik dari sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);

- 3. Kelembagaan dan Tata Laksana** : Pada tahun 2018 Badan Pengelolaan Pajak Daerah mengalami perubahan nomenklatur berubah menjadi Bapenda Kabupaten Serang yang berfungsi untuk mengelola penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Hal ini menjadi suatu kekuatan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk lebih fokus melaksanakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja Bapenda Kabupaten Serang adalah produktivitas, kualitas layanan, *responsiveness*, *responsibility* dan akuntabilitas. Berkenaan dengan adanya Unit Pelaksana Teknis Pelayanan pajak daerah turut menjadikan kekuatan bagi Badan Pendapatan Daerah karena dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan terhadap wajib pajak dalam membayar pajak serta lebih fokus dalam menangani pajak daerah;
- 4. Sumber Daya Manusia** : Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang Strata-2 dan Strata-1, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Bapenda dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak;
- 5. Pembiayaan** : Tersedianya anggaran/dana yang memadai untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Serang;
- 6. Sarana/Prasarana** : Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah sehingga optimalisasi pengelolaan data pajak daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana;
- 7. Kepemimpinan**; Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Bapenda Kabupaten Serang. Dalam memimpin organisasinya kedua aspek tersebut akan mempengaruhi kinerja para pegawai yang berada didalamnya. Hal ini terkait dengan *human relation*, *delegation of authority* (pendelegasian wewenang) dan *division of work* (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf yang sangat tinggi sebagai institusi, dapat mewujudkan visi dan misi Bapenda Kabupaten Serang;

KELEMAHAN (WEAKNESS)

- 1. Hukum dan Perundangan :** Belum komprehensifnya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pajak daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Badan yang mengatur dan menetapkan tentang tata kelola pajak daerah yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
- 2. Luas wilayah dan Potensi:** luas wilayah Kabupaten Serang 1.467,35 Km² yang terdiri dari 29 kecamatan dan 326 desa dengan keterbatasan personil menyulitkan untuk melakukan pemetaan potensi pajak daerah baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi;
- 3. Sumber Daya Manusia :** Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pajak daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah. Pegawai Bapenda masih perlu pengembangan kompetensi di bidang pajak daerah, seperti diklat penilaian, diklat pemeriksaan, diklat PPNS, jurusita dan diklat penyuluhan pajak.
- 4. Sarana/Prasarana :** Sarana dan prasarana pada Bapenda terutama sistem yang terintegrasi dengan Perangkat Daerah terkait masih dalam tahapan persiapan sehingga pembayaran pajak belum sepenuhnya dapat di laksanakan secara online.

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITY)

1. Dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamankan dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
2. Dukungan dari unsur pimpinan dan Lembaga Legislatif kepada Bapenda Kabupaten Serang atas pengelolaan pajak daerah di wilayah Kabupaten Serang;
3. Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Serang yang cukup kondusif sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Serang;
4. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri, perdagangan dan jasa maka berpeluang meningkatkan potensi pajak daerah;
5. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan teknologi informasi;
6. Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di Kabupaten Serang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan;
7. Telah terjalinnya kerjasama yang baik dengan para *stakeholder*, seperti pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah

daerah lainnya, instansi terkait lainnya seperti lembaga perbankan, PT. POS, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat sehingga pelayanan publik dapat lebih baik;

ANCAMAN (THREAT)

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan daerah termasuk pemahaman tentang teknologi informasi;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah;
3. Wilayah yang luas dengan keterbatasan sumber daya manusia akan menyulitkan pelayanan secara merata kepada masyarakat;
4. Kebijakan/regulasi pemerintah pusat belum ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis yang diatur dengan peraturan pemerintah sehingga penerapan atas kebijakan pemerintah pusat menyulitkan pemerintah daerah khususnya dalam bidang perpajakan daerah;
5. Dikarenakan adanya lokasi objek pajak/subjek pajak dengan kabupaten/kota yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Serang, maka akan berdampak terhadap pembagian realisasi pajak itu sendiri terhadap masing-masing wilayah;

STRATEGI UMUM KINERJA BAPENDA KABUPATEN SERANG:

- a. **Tahap Perencanaan;** Perencanaan dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dengan mempertimbangkan usulan dari bidang-bidang pengelola pajak daerah dan retribusi daerah realisasi tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya atas berbagai potensi pajak daerah sehingga dapat ditentukan jumlah besaran target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan Retribusi Daerah untuk jangka waktu tertentu;
- b. **Tahap Pelaksanaan;** Pelaksanaan dii dengan kegiatan penggalian potensi, pendaftaran, pendataan, penetapan, pemeriksaan, penagihan, dan pelaporan atas kegiatan pemungutan pajak daerah;
- c. **Tahap Koordinasi;** Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait sebagai unit kerja pengelola sumber pajak daerah;
- d. **Tahap Pengawasan;** Pengawasan internal maupun eksternal dilakukan secara periodik dan temporer.
- e. **Tahap Evaluasi;** Evaluasi dilakukan secara internal setiap bulan dan eksternal setiap triwulan dengan melibatkan Bapenda selaku pengelola PAD, Bapenda pendukung termasuk unsur legislatif dan BUMD.

Isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bapenda yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yaitu penerimaan pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki.

Dengan melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Isu strategis pada RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat belum merata
2. Masih adanya kasus- kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan kesehatan yang berkualitas
3. Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang
4. Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai tingkatan pada standar yang baik
6. Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal.
7. Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencerminkan ketentraman, keamanan dan ketertiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Belum meratanya pembangunan antar wilayah (kecamatan)
9. Masih banyak ditemukan tatakelola lingkungan hidup baik yang berada di wilayah industri, permukiman dan perumahan belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, terutama terkait dengan persoalan penanganan pencemaran lingkungan dan limbah
10. Masih tingginya angka ketergantungan fiskal daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan
11. Masih banyak ditemukan kondisi kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang belum memenuhi persyaratan hidup layak, terutama terkait dengan rumah tidak layak huni, kualitas sanitasi lingkungan dan persampahan.

Dengan telah ditetapkannya prioritas pembangunan pada tahun 2025, program dan kegiatan harus diarahkan untuk mendukung tercapainya seluruh target yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Bapenda Kabupaten Serang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala

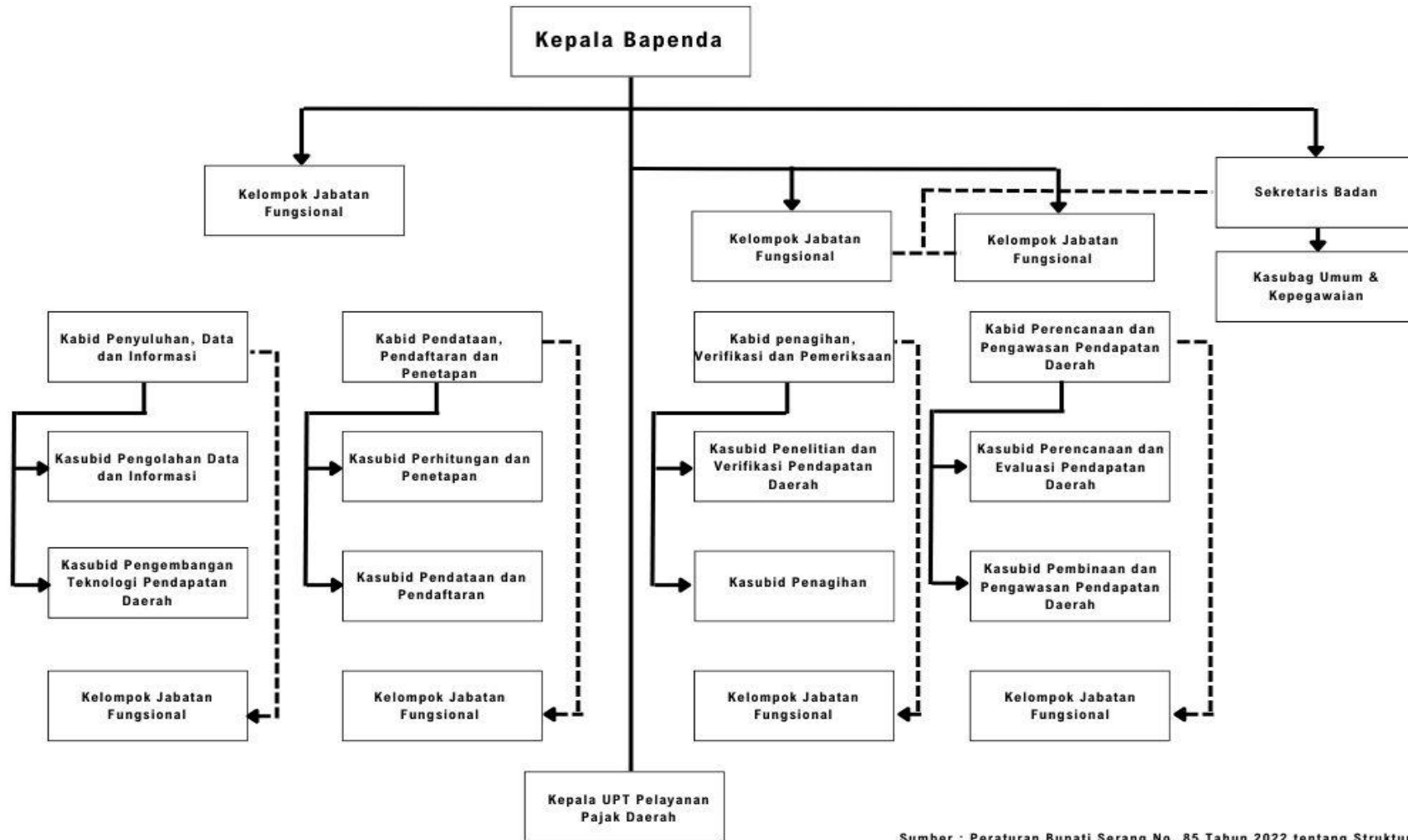
Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris yang membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bidang, dan 1 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah membawahi
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
- d. Bidang Penyuluhan, Data dan Informasi membawahi :
 1. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pendapatan Daerah;
- e. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan membawahi:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan;
- f. Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan:
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Verifikasi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Gambar 2.3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang

STRUKTUR ORGANISASI BAPENDA KABUPATEN SERANG



Sumber : Peraturan Bupati Serang No. 85 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Tabel berikut menyajikan perbandingan pagu anggaran Rancangan Akhir RKPD dengan Pagu Kebutuhan Dana Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat perbedaan antara pagu pada Rancangan Akhir RKPD 2025 dengan Kebutuhan Dana tahun 2025 pada Bapenda Kabupaten Serang. Hal ini menunjukkan ketidakselarasan antara rencana Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serang dengan Renja Perubahan Bapenda Kabupaten Serang pada tahun 2025. Pagu ini merupakan hasil dari RKPD Perubahan, sehingga terdapat penyesuaian terhadap anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, baik terkait program, kegiatan, atau sumber daya yang dialokasikan dan harus disesuaikan kembali.

Tabel 2.4.1 Review terhadap Rancangan Renja Akhir Perubahan 2025

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rancangan RKPD 2025	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Serang	100%	52.851.778.095	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Serang	100%	52.851.778.095	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan	Serang	100%	31.265.606	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan	Serang	100%	31.265.606	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Serang	9 Dokumen	12.220.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Serang	9 Dokumen	12.220.000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Serang	2 Dokumen	5.856.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Serang	2 Dokumen	5.856.000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Serang	2 Dokumen	5.856.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Serang	2 Dokumen	5.856.000	
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Serang	4 Laporan	7.333.606	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Serang	4 Laporan	7.333.606	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan	Serang	100%	47.534.915.547	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan	Serang	100%	47.534.915.547	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Serang	73 Orang/Bulan	47.533.398.047	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Serang	73 Orang/Bulan	47.533.398.047	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rancangan RKPD 2025	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Serang	4 Laporan	1.517.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Serang	4 Laporan	1.517.500	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran tepat waktu	Serang	100%	1.539.408.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran tepat waktu	Serang	100%	1.539.408.000	
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Serang	2 Paket	29.956.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Serang	2 Paket	29.956.000	
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Serang	6 Paket	323.429.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Serang	6 Paket	323.429.000	
3.3	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Serang	2 Paket	199.635.000	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Serang	2 Paket	199.635.000	
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Serang	2 Paket	125.155.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Serang	2 Paket	125.155.000	
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Serang	12 Dokumen	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Serang	12 Dokumen	18.000.000	
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Serang	4 Laporan	843.233.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Serang	4 Laporan	843.233.000	
4	Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Serang	100%	1.396.050.000	Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Serang	100%	1.396.050.000	
4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Serang	2 unit	1.308.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Serang	2 unit	1.308.000.000	Kendaraan operasional Molling
4.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Serang	1 Unit	88.050.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Serang	1 Unit	88.050.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rancangan RKPD 2025	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Serang	100%	1.755.720.448	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Serang	100%	1.755.720.448	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Serang	1 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Serang	1 Laporan	10.000.000	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Serang	4 Laporan	1.013.756.456	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Serang	4 Laporan	1.013.756.456	
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Serang	4 Laporan	731.963.992	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Serang	4 Laporan	731.963.992	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Serang	100%	594.418.494	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Serang	100%	594.418.494	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Serang	33 Unit	161.955.850	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Serang	33 Unit	161.955.850	
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Serang	80 Unit	56.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Serang	80 Unit	56.400.000	
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Serang	2 Unit	255.182.644	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Serang	2 Unit	255.182.644	
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Serang	43 Unit	120.880.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Serang	43 Unit	120.880.000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah	Serang	100%	7.138.206.116	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah	Serang	100%	7.138.206.116	
7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Pendapatan Daerah	Serang	100%	7.138.206.116	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Pendapatan Daerah	Serang	100%	7.138.206.116	
		Persentase Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu	Serang	100%			Persentase Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu	Serang	100%		

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rancangan RKPD 2025	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif	Serang	100%			Persentase pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif	Serang	100%		
		Persentase pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah	Serang	100%			Persentase pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah	Serang	100%		
		Persentase Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Serang	100%			Persentase Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Serang	100%		
		Persentase Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Serang	100%			Persentase Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Serang	100%		
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Serang	100%			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Serang	100%		
		Persentase Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Serang	100%			Persentase Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Serang	100%		
		Persentase Pelaksanaan Penilaian PBB P2	Serang	100%			Persentase Pelaksanaan Penilaian PBB P2	Serang	100%		
		Persentase Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Serang	100%			Persentase Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Serang	100%		
		Persentase Realisasi Penagihan Pajak Daerah	Serang	100%			Persentase Realisasi Penagihan Pajak Daerah	Serang	100%		
		Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Serang	100%			Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Serang	100%		
		Persentase Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah	Serang	100%			Persentase Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah	Serang	100%		
7.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Serang	2 Dokumen	246.352.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Serang	2 Dokumen	246.352.000	Rekonsiliasi Pajak Daerah
7.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Serang	10 Dokumen	27.440.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Serang	10 Dokumen	27.440.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rancangan RKPD 2025	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	998.280.400	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	998.280.400	Anugrah Pajak Daerah dan Desiminasi Pajak Daerah/Opsen
7.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Serang	54 Unit	1.448.051.904	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Serang	54 Unit	1.448.051.904	
7.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	712.790.320	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	712.790.320	Pemutakhiran Objek Pajak dan SMART MAP
7.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Serang	12 Laporan	807.429.952	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Serang	12 Laporan	807.429.952	
7.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Serang	25 Objek Pajak	701.990.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Serang	25 Objek Pajak	701.990.000	Penilaian Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah (ZNT)
7.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	713.056.164	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	713.056.164	
7.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Serang	10.144 Layanan	404.403.568	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Serang	10.144 Layanan	404.403.568	Pelayanan keliling/moling pajak daerah dan keg di UPT
7.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Serang	12 Dokumen	5.840.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Serang	12 Dokumen	5.840.000	
7.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	446.346.000	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	446.346.000	Kegiatan opsen PKB dan BBNKB/Razia Pajak Kendaraan Bermotor
7.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	1.152.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	1.152.000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif Rancangan RKPD 2025	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	460.247.808	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	460.247.808	
7.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Serang	4 Laporan	67.770.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Serang	4 Laporan	67.770.000	
7.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Serang	2 Laporan	97.056.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Serang	2 Laporan	97.056.000	
	BELANJA OPERASI				12.456.586.164	BELANJA OPERASI				12.456.586.164	
	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN				47.533.398.047	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN				47.533.398.047	
	TOTAL BELANJA				59.989.984.211	TOTAL BELANJA				59.989.984.211	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas Bapenda Kabupaten Serang mempunyai 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Renja Perubahan Bapenda Kabupaten Serang diselaraskan dengan Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD;
 - d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik
 - d) Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pengadaan Mebel
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan:
 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

- a) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
- b) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah
- c) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- d) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
- e) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- f) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- g) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- i) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- j) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- k) Penagihan Pajak Daerah
- l) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- m) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- n) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- o) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Anggaran disesuaikan dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada saat Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Tahun 2025 tidak ada usulan yang berkaitan langsung dengan Bapenda Kabupaten Serang namun program yang dilaksanakan tetap mengacu pada prioritas yang telah dicanangkan dalam Renja. Program dan kegiatan dalam Renja Bapenda Kabupaten Serang tahun 2025 disusun dengan mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang kemudian dilakukan penyelarasan pada sekretariat untuk seterusnya disusun menjadi Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Serang. Usulan program dan kegiatan dari Sekretariat yang mengakomodir seluruh kepentingan bidang kemudian disusun menjadi program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Serang. Program dan kegiatan Bapenda ditetapkan dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
KEUANGAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Serang	52.851.778.095	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	Serang	31.265.606	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Serang	12.220.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Serang	5.856.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Serang	5.856.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Serang	7.333.606	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan	100%	Serang	47.534.915.547	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/Bulan	Serang	47.533.398.047	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	Serang	1.517.500	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran tepat waktu	100%	Serang	1.539.408.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Serang	29.956.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Serang	323.429.000	
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Serang	199.635.000	
Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Serang	125.155.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Serang	18.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Serang	843.233.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	Serang	1.396.050.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	Serang	1.308.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Serang	88.050.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	Serang	1.755.720.448	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Serang	10.000.000	

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Serang	1.013.756.456	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Serang	731.963.992	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	Serang	594.418.494	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	Serang	161.955.850	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	Serang	56.400.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Serang	255.182.644	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	Serang	120.880.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah	100%	Serang	7.138.206.116	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Pendapatan Daerah	100%	Serang	7.138.206.116	
	Persentase Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	Serang		
	Persentase pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif	100%	Serang		
	Persentase pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah	100%	Serang		
	Persentase Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	Serang		
	Persentase Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	Serang		
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100%	Serang		
	Persentase Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100%	Serang		
	Persentase Pelaksanaan Penilaian PBB P2	100%	Serang		
	Persentase Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah	100%	Serang		
	Persentase Realisasi Penagihan Pajak Daerah	100%	Serang		
	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	100%	Serang		
	Persentase Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah	100%	Serang		
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	Serang	246.352.000	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	20 Dokumen	Serang	27.440.000	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	Serang	998.280.400	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	54 Unit	Serang	1.448.051.904	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Serang	712.790.320	

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	Serang	807.429.952	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	25 Objek Pajak	Serang	701.990.000	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen	Serang	713.056.164	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10.144 Layanan	Serang	404.403.568	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	Serang	5.840.000	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen	Serang	446.346.000	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	Serang	1.152.000	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	Serang	460.247.808	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	Serang	67.770.000	
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	Serang	97.056.000	
BELANJA OPERASI				12.456.586.164	
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN				47.533.398.047	
TOTAL BELANJA				59.989.984.211	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPENDA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Serang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang semata, akan tetapi perlu dukungan dari *stakeholders* lainnya seperti legislatif, instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Serang, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Serang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan tahun 2026.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Penyusunan RPJMD harus memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi, hal itu dikarenakan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, skala prioritas pembangunan Provinsi Banten selama kurun waktu lima tahun (2017-2022) adalah:

1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian;
4. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
5. Pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan
7. Pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bapenda

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap tahun, dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu

keberhasilan yang ada, dan tujuan yang realistis yang dapat dicapai. Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam keberhasilan pencapaian harapan terhadap terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah, karena hal tersebut merupakan janji Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Serang 2021-2026.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Badan pendapatan daerah Kabupaten Serang, serta dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah "*Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis*". Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 yaitu: "Serang yang Islami, Maju, Adil, Sejahtera dan Harmonis". Dalam konteks keterpaduan pembangunan nasional dan provinsi, visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Kabupaten Serang untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Banten dan visi pembangunan nasional.

Uraian makna yang terkandung dalam Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

MAJU : Pembangunan dilakukan di segala sektor untuk meningkatkan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat yang didukung dengan pembenahan infrastruktur pada diseluruh wilayah Kabupaten Serang.

SEJAHTERA : Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan) dan kebutuhan batiniah (agama dan budaya) masyarakat Kabupaten Serang. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Serang untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.

BERKEADILAN: Pembangunan di Kabupaten Serang dilakukan secara merata dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

AGAMIS : Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan beberapa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional.
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Sebagaimana diurai pada bagian terdahulu, bahwa tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Serang adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendapatan daerah sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa Bapenda Kabupaten Serang mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut:

1. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari visi Kabupaten Dengan penetapan misi Kabupaten Serang tersebut, sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan oleh Bapenda Kabupaten Serang pada misi ke 5, sejalan dengan isu strategis tugas pokok dan fungsinya, maka tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Serang yang sinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut

**Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja
Bapenda Kabupaten Serang**

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN
Visi Kab.Serang <i>“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”.</i>	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan & pelayanan publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Misi ke-5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Bapenda adalah sekumpulan rencana kerja suatu perangkat daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bapenda dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Bapenda menurut Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025 dilakukan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Mendukung tercapainya perwujudan Kabupaten Serang yang memiliki keunggulan lokal;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar Nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel berikut dapat dilihat gambaran plafon dana belanja langsung untuk masing-masing program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, tahun 2025 yaitu :

Tabel 3.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Bapenda Kabupaten Serang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Kerja 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Serang	100%	52.851.778.095			100%	43.888.123.341
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan	Serang	100%	31.265.606	DAU		100%	185.680.000
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Serang	9 Dokumen	12.220.000	DAU		9 Dokumen	55.000.000
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Serang	2 Dokumen	5.856.000	DAU		2 Dokumen	24.000.000
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Serang	2 Dokumen	5.856.000	DAU		2 Dokumen	24.000.000
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Serang	4 Laporan	7.333.606	DAU		4 Laporan	72.600.000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan	Serang	100%	47.534.915.547			100%	36.354.970.000
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Serang	73 Orang/ Bulan	47.533.398.047	APBD		73 Orang/ Bulan	36.048.800.000
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Serang	-	-	-		4 Dokumen	302.400.000
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Serang	4 Laporan	1.517.500	DAU		12 Laporan	3.770.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran tepat waktu	Serang	100%	1.539.408.000			100%	2.494.049.160
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Serang	2 Paket	29.956.000	APBD		3 Paket	63.215.420
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Serang	6 Paket	323.429.000	DAU		3 Paket	244.120.000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Serang	3 Paket	199.635.000	DAU		3 Paket	197.685.740
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Serang	2 Paket	125.155.000	DAU		3 Paket	120.528.000
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Serang	12 Dokumen	18.000.000	DAU		12 Dokumen	18.000.000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Serang	4 Laporan	843.233.000	APBD		4 Laporan	1.850.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan kegiatan	Rencana Kerja 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Serang	100%	1.396.050.000			100%	2.044.030.000
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Serang	2 unit	1.308.000.000	DAU			1.900.000.000
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Serang	1 Unit	88.050.000	DAU		15 Unit	144.030.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Serang	100%	1.755.720.448			100%	1.733.977.181
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Serang	1 Laporan	10.000.000	APBD		4 Laporan	7.000.000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Serang	4 Laporan	1.013.756.456	DAU		4 Laporan	860.859.896
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Serang	4 Laporan	731.963.992	DBH		4 Laporan	866.117.285
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Serang	100%	594.418.494			100%	1.075.417.000
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Serang	33 Unit	161.955.850	DBH		23 Unit	517.115.000
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Serang	80 Unit	56.400.000	DAU		44 Unit	113.172.000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Serang	2 Unit	255.182.644	DAU		2 Unit	249.090.000
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Serang	43 Unit	120.880.000	DAU		44 Unit	196.040.000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah	Serang	100%	7.138.206.116	APBD		100%	9.143.765.500
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Pendapatan Daerah	Serang	100%	7.138.206.116	APBD		100%	9.143.765.500
		Persentase Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu		100%				100%	
		Persentase pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif		100%				100%	
		Persentase pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah		100%				100%	
		Persentase Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		100%				100%	
		Persentase Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan kegiatan	Rencana Kerja 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		100%				100%	
		Persentase Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		100%				100%	
		Persentase Pelaksanaan Penilaian PBB P2		100%				100%	
		Persentase Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah		100%				100%	
		Persentase Realisasi Penagihan Pajak Daerah		100%				100%	
		Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah		100%				100%	
		Persentase Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah		100%				100%	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Serang	2 Dokumen	246.352.000	APBD		2 Dokumen	513.590.000
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Serang	20 Dokumen	27.440.000	APBD		5 Dokumen	224.345.000
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	998.280.400	APBD		4 Laporan	1.624.120.000
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Serang	54 Unit	1.448.051.904	APBD		4 Unit	1.037.890.000
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	712.790.320	APBD		4 Laporan	1.053.735.700
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Serang	12 Laporan	807.429.952	APBD		4 Laporan	643.435.600
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Serang	25 Objek Pajak	701.990.000	APBD		25 Objek Pajak	1.275.465.000
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	713.056.164	APBD		4 Dokumen	674.940.000
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Serang	10.144 Layanan	404.403.568	APBD		10.144 Layanan	444.240.000
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Serang	12 Dokumen	5.840.000	APBD		12 Dokumen	43.300.000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	446.346.000	APBD		4 Dokumen	514.440.000
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	1.152.000	APBD		4 Dokumen	130.180.000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	460.247.808	APBD		4 Dokumen	647.034.200
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Serang	4 Laporan	67.770.000	APBD		4 Laporan	317.050.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Kerja 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Serang	2 Laporan	97.056.000	APBD		4 Laporan	27.400.000
	BELANJA OPERASI				12.456.586.164				16.983.088.841
	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN				47.533.398.047				36.048.800.000
	TOTAL BELANJA				59.989.984.211				53.031.888.841

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Program Prioritas pada Bapenda Kabupaten Serang, antara sebagai berikut:

1. Anugrah Pajak Daerah;
2. Penilaian Zona Nilai Tanah;
3. Pemutkahiran objek pajak;
4. Diskon Pajak dalam rangka HUT Kabupaten Serang;
5. Penetapan Pajak Daerah;
6. Rekonsiliasi Pajak Daerah;
7. Desiminasi Pajak Daerah ;
8. Razia Pajak Kendaraan bermotor; dan
9. Penguatan E-TPD Bersama dengan TP2DD.

Di bawah ini disajikan tabel yang menggambarkan Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Bapenda Kabupaten Serang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Kerja 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5.02	KEUANGAN						
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah, dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Serang	100%	52.851.778.095		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan	Serang	100%	31.265.606	DAU	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Serang	9 Dokumen	12.220.000	DAU	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Serang	2 Dokumen	5.856.000	DAU	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Serang	2 Dokumen	5.856.000	DAU	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Serang	4 Laporan	7.333.606	DAU	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan	Serang	100%	47.534.915.547		
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Serang	73 Orang/ Bulan	47.533.398.047	APBD	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Serang	-	-	-	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Serang	4 Laporan	1.517.500	DAU	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran tepat waktu	Serang	100%	1.539.408.000		
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Serang	2 Paket	29.956.000	APBD	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Serang	6 Paket	323.429.000	DAU	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Serang	3 Paket	199.635.000	DAU	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Serang	2 Paket	125.155.000	DAU	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Serang	12 Dokumen	18.000.000	DAU	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Serang	4 Laporan	843.233.000	APBD	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Serang	100%	1.396.050.000		
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Serang	2 unit	1.308.000.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Kerja 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Serang	1 Unit	88.050.000	DAU	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Serang	100%	1.755.720.448		
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Serang	1 Laporan	10.000.000	APBD	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Serang	4 Laporan	1.013.756.456	DAU	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Serang	4 Laporan	731.963.992	DBH	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Serang	100%	594.418.494		
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Serang	33 Unit	161.955.850	DBH	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Serang	80 Unit	56.400.000	DAU	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Serang	2 Unit	255.182.644	DAU	
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Serang	43 Unit	120.880.000	DAU	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan asli daerah	Serang	100%	7.138.206.116	APBD	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Pendapatan Daerah	Serang	100%	7.138.206.116	APBD	
		Persentase Dokumen Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tepat waktu		100%			
		Persentase pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan secara efektif		100%			
		Persentase pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah		100%			
		Persentase Pelaksanaan Pengolahan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		100%			
		Persentase Pengembangan Teknologi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		100%			
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					
		Persentase Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		100%			
		Persentase Pelaksanaan Penilaian PBB P2		100%			
		Persentase Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah		100%			
		Persentase Realisasi Penagihan Pajak Daerah		100%			
		Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah		100%			
		Persentase Pelaksanaan Verifikasi Pajak Daerah		100%			
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Serang	2 Dokumen	246.352.000	APBD	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Serang	20 Dokumen	27.440.000	APBD	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	Serang	4 Laporan	998.280.400	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Kerja 2025				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Daerah	Pajak Daerah					
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Serang	54 Unit	1.448.051.904	APBD	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Serang	4 Laporan	712.790.320	APBD	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Serang	12 Laporan	807.429.952	APBD	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Serang	25 Objek Pajak	701.990.000	APBD	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	713.056.164	APBD	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Serang	10.144 Layanan	404.403.568	APBD	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Serang	12 Dokumen	5.840.000	APBD	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	446.346.000	APBD	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	1.152.000	APBD	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Serang	4 Dokumen	460.247.808	APBD	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Serang	4 Laporan	67.770.000	APBD	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Serang	2 Laporan	97.056.000	APBD	
	BELANJA OPERASI				12.456.586.164		
	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN				47.533.398.047		
	TOTAL BELANJA				59.989.984.211		

BAB V PENUTUP

Renja Perubahan Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun kelima dari Renstra Tahun 2021-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai. Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, Indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran sehingga pelaksanaannya dapat diukur.

Renja Perubahan ini Tahun 2025 disusun sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perubahan Bapenda Kabupaten Serang Tahun 2025 ini mengacu pada RKPD Perubahan, sehingga perlu adanya revisi atau penyesuaian terhadap anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, baik terkait program, kegiatan, atau sumber daya yang dialokasikan. Selain itu, penyusunan dokumen ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Bapenda Kabupaten Serang selama Tahun Anggaran sebelumnya, dan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun institusi wadah organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Pemerintahan Daerah untuk menuju terciptanya landasan pemerintahan yang baik dan bersih.

Serang, 31 Juli 2025



Drs. H. M. ISHAK AR, M.Si
NIP. 19710907 199202 1 001